



MULAI
SEPTEMBER

**AIRBUS A320 SUPER AIR JET
KEMBALI TERBANG SETIAP HARI
LAYANI RUTE BAUBAU-MAKASSAR**

TIKET
DITARGET
Rp800
RIBU



Super Air Jet kembali melayani rute Baubau-Makassar setiap hari mulai September 2026.



Tiket ditarget mulai Rp800 ribu.



Menggunakan pesawat Airbus A320 berkapasitas lebih besar dan nyaman.



Hasil sinergi Bandara Betoambari, Pemkot Baubau, dan pemerintah daerah di Kepulauan Buton.



Landasan pacu minimal 2.000 meter dan apron dengan nilai PCN minimal 40.



Keamanan dan keselamatan penerbangan dievaluasi setiap hari sesuai aturan.



Meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat Baubau dan Kepulauan Buton ke Makassar.



Masyarakat dapat sampaikan masukan dan keluhan kepada pihak bandara untuk pelayanan yang lebih baik.

Laporan: Firman/Prasetio, Baubau Post-Durasi Times

BAUBAU, BP- Konektivitas udara Kepulauan Buton (Kepton) menuju Makassar, Sulawesi Selatan, akan kembali diperkuat mulai September 2026. Super Air Jet dijadwalkan membuka kembali layanan Baubau-Makassar menggunakan Airbus A320 dengan tarif yang ditargetkan mulai Rp800 ribu.

Penggunaan pesawat berkapasitas lebih besar itu menjadi salah satu upaya menekan biaya perjalanan udara dari Baubau. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Betoambari Baubau,

Anas La Bakara, S.T., membandingkan tarif penerbangan yang selama ini menggunakan Wings Air jenis ATR 72 dan dapat mencapai sekitar Rp1,9 juta.

“Langkah konkret yang dilakukan Pemerintah Kota Bau-

bau adalah menghadirkan Airbus A320 untuk menekan harga tiket dari Rp1,9 juta menjadi Rp800 ribu,” kata Anas se usai Coffee Morning di gedung aula Bandara Betoambari, Jumat (28/8/2026).

Super Air Jet direncanakan melayani rute tersebut setiap hari. Untuk mendukung pengoperasian Airbus A320, Bandara Betoambari menyiapkan landasan pacu dengan panjang minimal 2.000 meter, sedangkan apron memiliki persyaratan nilai Pavement Classification Number (PCN) minimal 40.

Kehadiran maskapai tersebut tidak berdiri sendiri. Anas

mengatakan pengoperasian kembali rute Baubau-Makassar merupakan hasil sinergi Bandara Betoambari dengan Pemerintah Kota Baubau serta pemerintah daerah lain di Kepton, yakni Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Utara, dan Buton Tengah. “Sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah sudah terjalin dengan baik. Ini dibuktikan dengan

Lanjut ke Hal: 7

Kebakaran Lahan di Baubau Meluas, Rumah Warga hingga Kapal Nelayan Bekas Ikut Dilalap Api, , Warga Kembali Diingatkan Soal Pembakaran dan Terus Waspada, Tidak Ada Korban Jiwa



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP- Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Bantuan Masyarakat Kota Baubau menangani tiga keba-

karan lahan serta sejumlah operasi penyelamatan pada Jumat (28/8/2026). Kebakaran terjadi di beberapa kelurahan dengan luasan terdampak mulai sekitar 50 meter

persegi hingga lebih dari dua hektare, tetapi tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerugian signifikan.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan

Bantuan Masyarakat Kota Baubau Ka Ode Ali Hasan mengatakan kondisi angin menjadi salah satu faktor yang mempercepat penyebaran api. Di Jalan Jambu Mete, Kelurahan Bukit Wolio Indah (BWI), api diduga berasal dari pembakaran sampah yang kemudian meluas dan menghancurkan lahan sekitar 50 meter persegi. “Kami mengimbau masyarakat menahan diri melakukan pembakaran karena kelalaian dapat berdampak dan menimbulkan kerugian bagi orang lain,”

Lanjut ke Hal: 7

Rakernas JKPI XII di Ternate, Buton Selatan Dorong Kolaborasi Pelestarian Budaya



Laporan: Ardi

BUTON SELATAN, BP - Pemerintah Kabupaten Buton Selatan memanfaatkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XII Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) 2026 di Ternate, Maluku Utara, untuk memperkuat

jejaring kerja sama antardaerah dalam pelestarian warisan budaya dan sejarah. Forum yang berlangsung 26-30 Agustus 2026 itu mempertemukan kepala daerah dan delegasi dari berbagai wilayah Indonesia.

Lanjut ke Hal: 7

Ujian Komprehensif STAI YPIQ Baubau, Mahasiswa Diminta Jujur dan Berintegritas



Laporan: Firman

BAUBAU, BP - Integritas akademik menjadi salah satu pesan utama dalam pelaksanaan Ujian Komprehensif dan Munaqasyah Skripsi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yayasan Pendidikan Islam

Qaimuddin (YPIQ) Baubau. Ujian yang berlangsung selama tiga hari, 26-28 Agustus 2026, itu menjadi tahap penting untuk memastikan mahasiswa tidak hanya menguasai bidang keilmuan, tetapi juga mampu mempertang-

Lanjut ke Hal: 7

Motor Warga Bernama Musrifa Hilang di Parkiran Lippo Plaza Baubau, Ditemukan di Butur, Sky Parking Akui Lalai SOP



Laporan: Firman

BAUBAU, BP - Sepeda motor milik Musrifa yang hilang dari area parkir Lippo Plaza Baubau pada 17 Agustus 2026



akhirnya ditemukan di Kabupaten Buton Utara (Butur). Kendaraan tersebut sempat diamankan di Polres Buton Utara sebelum dibawa kembali ke Baubau dengan biaya

transportasi ditanggung pengelola parkir Sky Parking. Pemilik kendaraan menyatakan persolan tersebut tidak

Lanjut ke Hal: 7

Mulai September, Airbus A320 Super Air Jet Kembali Terbang Setiap Hari Layani Rute Baubau-Makassar Tiket Ditarget Rp800 Ribu

dukungan Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim bersama kabupaten sekitar,” ujarnya.

Secara historis, penerbangan domestik Indonesia berkembang menjadi salah satu tulang punggung konektivitas antardaerah kepulauan. Pertumbuhan tersebut semakin penting bagi wilayah yang secara geografis dipisahkan laut seperti Kepulauan Buton. Dalam sejarah penerbangan global, penggunaan pesawat berkapasitas lebih besar pada rute dengan permintaan memadai juga menjadi bagian dari upaya industri penerbangan mening-

katkan efisiensi angkutan penumpang.

Namun, peningkatan konektivitas tetap dibarengi aspek keselamatan. Pengelola Bandara Betoambari menyatakan evaluasi dan peningkatan keamanan serta keselamatan penerbangan dilakukan setiap hari sesuai Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 3. “Untuk keamanan dan keselamatan, kita melakukan peningkatan dan evaluasi setiap hari dalam rangka meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan,” kata Anas.

Anas juga meminta me-

dia ikut mengawal penyampaian informasi penerbangan kepada masyarakat, termasuk menyampaikan keluhan pengguna jasa kepada pengelola bandara. “Kami juga membutuhkan masukan dari wartawan. Jika terjadi komplain, segera sampaikan kepada pihak bandara,” pungkasnya. Kembalinya Super Air Jet diharapkan tidak hanya memberikan alternatif perjalanan dengan tarif lebih terjangkau, tetapi juga memperkuat mobilitas orang dan aktivitas ekonomi dari Baubau serta wilayah Kepton menuju Makassar.(*)

Kebakaran Lahan di Baubau Meluas, Rumah Warga hingga Kapal Nelayan Bekas Ikut Dilalap Api, , Warga Kembali Diingat-kan Soal Pembakaran dan Terus Waspada, Tidak Ada Korban Jiwa

katanya.

Situasi lebih serius terjadi di sekitar rumah warga Kelurahan Lowu-Lowu. Kobaran api mengepung rumah sehingga pemiliknya panik. Satu unit dari Bungi dengan lima personel dikerahkan dan meminta tambahan satu regu dari Mako. Pemadaman dilakukan secara manual dengan dukungan kepolisian setempat, sementara area yang terdampak diperkirakan lebih dari dua hektare.

Di Lingkungan Topa, Kelurahan Sulaa, api bahkan menjalar hingga membakar satu unit kapal nelayan bekas. Dua regu personel dikerahkan untuk melakukan evakuasi dan pemadaman hingga malam. Lahan ditangani menggunakan satu unit mobil pemadam, sedangkan kapal dipadamkan memakai floating pump dengan sumber air laut. Luas area terdampak diperkirakan sekitar 1.000 meter persegi.

Petugas juga menangani kebakaran lahan di kawasan Asriwijaya, Kelurahan BWI, setelah warga melihat api dari kawasan perumahan. Satu unit BWI dengan lima personel diterjunkan untuk memantau sekaligus mem-

batasi penyebaran api. Pemadaman dengan penyiraman tidak dilakukan karena kondisi medan yang menyulitkan akses petugas.

Rangkaian tugas pada hari itu tidak hanya berkaitan dengan kebakaran. Tiga personel rescue menggunakan kendaraan pikap mengevakuasi seekor anjing yang masuk ke lubang pembuangan di Lorong 88, Kelurahan BWI. Petugas juga mengamankan ular sepanjang sekitar satu meter yang bersembunyi di sela papan dekat dapur warung makan di Jembel Atas, Kelurahan Wajo, yang lingkungannya lembap dan banyak terdapat tikus kecil.

Petugas selanjutnya membantu warga di Jalan Anoa, Kelurahan Kadolomoko, melepas anjing yang penguncinya diduga meleleh dan menyatu dengan emas. Dengan menggunakan alat pemotong kuku, petugas melepaskan pengunci secara hati-hati. “Untuk penanganan hewan liar, warga sebaiknya membersihkan area lembap dan tidak menumpuk barang yang dapat menjadi tempat persembunyian,” ujar Ali Hasan.

Keterlibatan relawan dan kepolisian di sejumlah lokasi turut

mempercepat penyampaian informasi serta penanganan kejadian. Fenomena kebakaran lahan sendiri bukan persoalan baru di Indonesia. Pada musim kemarau, kombinasi lahan kering, aktivitas manusia, dan angin dapat mempercepat penjarangan api; secara historis, Indonesia juga pernah mengalami kebakaran hutan dan lahan berskala sangat besar, termasuk krisis asap lintas batas pada 1997-1998 dan 2015.

Secara global, kebakaran vegetasi juga menjadi ancaman berulang di berbagai kawasan. Kebakaran besar pernah melanda Australia pada musim 2019-2020, sementara Amerika Serikat, Kanada, dan sejumlah negara Eropa juga berulang menghadapi musim kebakaran ekstrem. Pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya pencegahan di tingkat masyarakat, terutama menghindari penggunaan api secara terbuka ketika kondisi lingkungan kering dan angin menguat.(*)

Rakernas JKPI XII di Ternate, Buton Selatan Dorong Kolaborasi Pelestarian Budaya

Keikutsertaan Buton Selatan ditandai dengan keterlibatan dalam rangkaian agenda Rakernas, termasuk Gala Dinner di Pendopo Wali Kota Ternate, Rabu (26/8/2026). Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dan Pemerintah Kota Ternate melakukan pertukaran cenderamata sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan antardaerah.

Bupati Buton Selatan diwakili Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton Selatan, Amir Sarlito Womal, S.Pd., M.Eng., dalam agenda tersebut. Amir menyerahkan cenderamata kepada Wali Kota Ternate, Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si. “Pertukaran cenderamata ini menjadi bagian dari silaturahmi dan penguatan hubungan antarpe-merintah daerah,” demikian konteks kegiatan tersebut.

Rakernas XII JKPI 2026 mengusung tema “Ternate Episentrum Rempah Dunia”. Tema itu menempatkan sejarah Ternate sebagai salah satu simpul penting perdagangan rempah sekaligus membuka ruang bagi daerah peserta untuk melihat warisan sejarah sebagai bagian dari pembangunan dan identitas daerah. “Jejaring JKPI menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi dalam pelestarian warisan budaya dan sejarah,” demikian tujuan yang melekat pada keikutsertaan Buton Selatan.

Secara historis, Ternate memiliki posisi penting dalam sejarah perdagangan rempah dunia, terutama karena komoditas cengkih dari Kepulauan Maluku menjadi bagian dari jaringan perdagangan internasional selama berabad-abad. Daya tarik rempah tersebut turut

membawa bangsa-bangsa Eropa ke kawasan Maluku sejak akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16. Jejak sejarah itu kini menjadi bagian penting dari upaya pelestarian pusaka dan penguatan identitas kawasan.

Dalam konteks Indonesia, perhatian terhadap kota dan kawasan pusaka berkembang seiring kebutuhan menjaga warisan sejarah di tengah perubahan perkotaan. JKPI kemudian menjadi wadah jejaring antardaerah untuk memperkuat komitmen tersebut melalui pertukaran pengalaman, gagasan, dan kerja sama pengelolaan pusaka. “Pelestarian warisan budaya membutuhkan kolaborasi, bukan hanya kerja satu daerah,” menjadi prinsip yang relevan dengan agenda Rakernas tersebut.

Bagi Buton Selatan, forum nasional itu sekaligus menjadi kesempatan memperluas hubungan dengan daerah-daerah lain yang memiliki kekayaan sejarah dan budaya. Pemerintah daerah memandang jejaring tersebut penting untuk mendukung pelestarian warisan budaya sekaligus mengembangkan potensi kota pusaka secara berkelanjutan.

Rangkaian Rakernas yang berlangsung hingga 30 Agustus 2026 diharapkan menghasilkan penguatan kolaborasi antardaerah dalam menjaga warisan sejarah dan budaya Indonesia. Bagi Buton Selatan, keterlibatan dalam forum tersebut menjadi bagian dari langkah memperkuat posisi kebudayaan daerah dalam jaringan kota pusaka nasional. “Kolaborasi antardaerah diharapkan terus berkembang untuk menjaga warisan budaya dan sejarah Indonesia,” demikian arah yang hendak diperkuat melalui keikutsertaan tersebut. (*)

Ujian Komprehensif STAI YPIQ Baubau, Mahasiswa Diminta Jujur dan Berintegritas

gungjawabkan karya ilmiahnya.

Pelaksanaan ujian dipusatkan di Kampus STAI YPIQ Baubau, Jalan Kartini, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, mulai Rabu (26/8/2026). Forum akademik tersebut mempertemukan mahasiswa dengan dosen penguji untuk menguji penguasaan materi, pemahaman keagamaan, serta kemampuan mempertahankan hasil penelitian yang telah disusun dalam skripsi.

Ketua STAI YPIQ Baubau, La Ode Abdul Salam Al Amin, S.Pd., MMA., menilai ujian komprehensif dan munaqasyah merupakan bagian krusial dalam perjalanan akademik mahasiswa. Menurut dia, tahapan tersebut tidak semestinya dipandang sebagai formalitas menjelang kelulusan, melainkan sebagai ruang untuk menguji keterpaduan ilmu dan kemampuan berpikir ilmiah.

“Ujian komprehensif dan munaqasyah ini bukan sekadar formalitas, melainkan ajang pembuktian atas integrasi keilmuan, kedalaman pemahaman agama, serta pertanggungjawaban ilmiah dari karya tulis yang telah Anda susun,” kata La Ode Abdul Salam.

Karena itu, mahasiswa diminta menyampaikan jawaban dan argumentasi secara rasional, jujur, serta berdasarkan kaidah keilmuan. Kritik dan masukan penguji juga diharapkan tidak dipandang sebagai hambatan, tetapi menjadi bahan untuk memperbaiki kualitas karya sebelum mahasiswa menyandang gelar sarjana.

Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau, Muslihi, M.Si., mengatakan gelar akademik semestinya menjadi konsekuensi dari proses pendidikan yang tidak hanya memben-

tuk kecakapan intelektual, tetapi juga karakter dan tanggung jawab moral. Ia meminta mahasiswa membuktikan komitmen dan integritas yang telah dibangun selama menempuh pendidikan di STAI YPIQ Baubau.

“Ujian komprehensif dan munaqasyah bukan sekadar agenda rutinitas akademis untuk meraih gelar sarjana. Ini adalah ajang pembuktian atas komitmen, integritas, dan kedalaman ilmu,” ujar Muslihi.

Muslihi juga meminta dosen penguji menjalankan proses evaluasi secara objektif, terukur, konstruktif, dan tetap bernuansa pembimbingan. Menurut dia, penilaian yang edukatif penting untuk menjaga mutu akademik sekaligus memastikan lulusan memiliki kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan ketika kembali berkiprah di tengah masyarakat.

Penekanan terhadap integritas akademik tersebut sejalan dengan perkembangan pendidikan tinggi modern yang menempatkan kejujuran ilmiah sebagai fondasi utama kegiatan akademik. Secara historis, praktik perguruan tinggi dan tradisi ilmiah di berbagai negara berkembang melalui prinsip pengujian pengetahuan, pembuktian argumentasi, dan pertanggungjawaban terhadap karya ilmiah. Di Indonesia, penguatan mutu pendidikan tinggi juga terus diarahkan agar gelar akademik tidak berhenti sebagai simbol kelulusan, melainkan mencerminkan kompetensi dan karakter lulusan.

Melalui pelaksanaan ujian selama tiga hari tersebut, STAI YPIQ Baubau diharapkan dapat melahirkan sarjana yang memiliki kompetensi akademik, pemahaman keagamaan, integritas, dan akhlak mulia. Para lulusan diharapkan mampu menggunakan pengetahuan yang diperoleh bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa.(*)

Motor Warga Bernama Musrifa Hilang di Parkiran Lippo Plaza Baubau, Ditemukan di Butur, Sky Parking Akui Lalai SOP

lagi dipermasalahkan setelah sepeda motornya kembali. Musrifa mengatakan dirinya telah menerima kembali kendaraan yang sebelumnya dinyatakan hilang dari area parkir pusat perbelanjaan tersebut.

“Motor saya sudah ditemukan dan sekarang sudah kembali kepada saya. Jadi, saya sudah tidak dipermasalahkan lagi kasus ini,” kata Musrifa.

Kasus itu bermula ketika Musrifa melaporkan kehilangan sepeda motor di kawasan parkir Lippo Plaza Baubau pada 17 Agustus. Berdasarkan penelusuran rekaman kamera pengawas atau CCTV, Marketing and Communication (Marketing) Lippo Plaza Baubau, Oger, mengatakan pelaku diduga telah berada cukup lama di kawasan parkir sebelum membawa kendaraan keluar.

Menurut Oger,

pelaku dapat meninggalkan area parkir setelah mengaku telah mengambil kunci kendaraan dan membayar denda karena kehilangan karcis parkir. Padahal, prosedur pengelolaan parkir mengharuskan pengguna jasa yang kehilangan karcis menunjukkan identitas diri dan dokumen kendaraan sebelum palang dibuka.

“Yang menjadi kelalaian adalah petugas tidak meminta KTP maupun STNK sebagaimana SOP. Pelaku hanya membayar denda kehilangan tiket, sehingga kendaraan bisa keluar,” ujar Oger saat diwawancarai awak media, Selasa (25/8/2026).

Supervisor (SPV) Sky Parking, Marfia, mengakui petugas tidak menjalankan prosedur tersebut saat kejadian. Sesuai SOP perusahaan, kehilangan karcis harus diikuti pemeriksaan KTP

dan STNK serta dokumentasi berupa foto kendaraan bersama pemilik sebelum kendaraan diperbolehkan meninggalkan lokasi. Petugas yang berjaga juga telah diberikan sanksi.

“Pada hari itu kami tidak menerapkan SOP tersebut,” kata Marfia.

Sky Parking menyatakan akan mengevaluasi pengawasan dan memperkuat penerapan prosedur di area parkir. Dalam proses penanganan kasus, pihak perusahaan telah meminta dokumen kepemilikan kendaraan berupa KTP, STNK, dan BBNKB sebagai kelengkapan klaim. Sementara itu, Oger menegaskan pengelolaan parkir di Lippo Plaza Baubau berada di bawah Sky Parking sebagai mitra operasional dan penyelesaian tanggu-

ng jawab dilakukan melalui mekanisme klaim asuransi.

Kehilangan kendaraan di fasilitas parkir menjadi persoalan yang berkaitan langsung dengan keamanan konsumen dan kepatuhan terhadap prosedur operasional. Dalam konteks yang lebih luas, sistem parkir modern berkembang dari pencatatan manual menuju penggunaan tiket elektronik, kamera pengawas, dan verifikasi identitas. Namun, keberadaan teknologi tetap bergantung pada ke-disiplinan petugas dalam menjalankan prosedur. Dalam kasus Baubau, celah terjadi ketika pemeriksaan identitas dan dokumen kendaraan tidak dilakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku.(*)

DPR Masukkan 13 Kejahatan dalam Sasaran RUU Perampasan Aset, Ini Daftarnya



Komisi III DPR RI mengungkap daftar 13 jenis tindak pidana yang diatur dan bisa dikenai perampasan aset dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Laporan: Rahmat

JAKARTA, BP- Komisi III DPR RI memasukkan 13 jenis tindak pidana ke dalam daftar kejahatan yang dapat dikenai perampasan aset dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana. Pembatasan tersebut disusun dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan kejahatan, dampak ekonomi, kerugian terhadap negara dan masyarakat, serta masukan dari sejumlah ahli.

Langkah itu menjadi bagian dari proses penyusunan RUU Perampasan Aset yang hingga kini masih menjadi pembahasan legislatif. Komisi III menyatakan cakupan tindak pidana perlu dirumuskan secara proporsional agar mekanisme perampasan aset tidak diterapkan secara berlebihan, tetapi tetap efektif untuk mengejar hasil kejahatan.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokman mengatakan pihaknya telah melakukan riset dan pendalaman mengenai jenis tindak pidana yang relevan dimasukkan dalam RUU tersebut. Kajian itu antara lain mempertimbangkan karakter kejahatan yang bermotif ekonomi serta memiliki dampak luas terhadap kepentingan publik.

“Mencermati masukan tersebut, dalam penyusunan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana, Komisi III DPR RI saat ini telah memasukkan dalam daftar mengenai tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset dalam undang-undang ini,” kata Habiburokman dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/8).

Menurut dia, masukan para ahli menjadi salah satu dasar dalam menentukan batasan tersebut. Para ahli,

kata Habiburokman, menekankan bahwa tindak pidana yang masuk dalam cakupan aturan sebaiknya berkaitan dengan motif ekonomi, merugikan negara dan masyarakat luas, atau memiliki tingkat keseriusan tinggi serta berdampak terhadap perekonomian publik.

Dari proses tersebut, Komisi III memasukkan tindak pidana korupsi sebagai salah satu kategori yang dapat dikenai perampasan aset. Selain itu, tindak pidana narkoba dan psikotropika, terorisme, serta penyelundupan manusia juga masuk dalam daftar.

Kategori lainnya adalah tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya. Komisi III juga memasukkan tindak pidana di bidang kehutanan, lingkungan hidup, serta perpajakan sebagai bagian dari cakupan yang tengah dirumuskan.

Daftar tersebut diperluas dengan tindak pidana di sektor perbankan dan perasuransian. Selanjutnya, tindak pidana di bidang pertambangan serta kelautan dan perikanan juga termasuk di dalamnya.

Jenis terakhir yang dicantumkan adalah tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian, terdapat 13 kelompok tindak pidana yang saat ini dimasukkan Komisi III sebagai jenis kejahatan yang dapat dikenai perampasan aset dalam rancangan aturan tersebut.

Pembahasan mengenai perampasan aset tidak terlepas dari kebutuhan negara untuk memulihkan kerugian dan mengembalikan hasil kejahatan. Di Indonesia, upaya mengejar aset hasil tindak pidana selama ini antara lain telah dilakukan melalui mekanisme pidana dan aturan mengenai pencucian uang.

Indonesia sebelumnya telah memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, gagasan mengenai penguatan mekanisme perampasan aset terus berkembang, terutama untuk menghadapi kejahatan yang menghasilkan keuntungan ekonomi dalam jumlah besar.

Secara internasional, isu perampasan hasil kejahatan juga telah menjadi bagian penting dalam kerja sama pemberantasan kejahatan terorganisasi dan korupsi. United Nations Convention against Corruption (UNCAC) yang diadopsi pada 2003, misalnya, menempatkan pengembalian aset sebagai salah satu prinsip penting dalam pemberantasan korupsi lintas negara.

Komisi III juga membandingkan kebijakan sejumlah negara sebelum menyusun cakupan tindak pidana dalam RUU tersebut. Habiburokman menyebut Selandia Baru memiliki mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana yang dapat diterapkan terhadap tindak pidana signifikan, antara lain yang memiliki ancaman pidana penjara lebih dari lima tahun dan nilai aset lebih dari NZ\$30 ribu.

Perbedaan pendekatan terlihat di sejumlah negara lain. Singapura, Paraguay, Uruguay, Filipina, Swiss, dan Belanda memiliki ketentuan perampasan aset yang dapat diterapkan terhadap tindak pidana narkoba ataupun kejahatan serius. Italia bahkan mengatur lebih spesifik dengan mencakup korupsi, mafia, dan tindak pidana teror organisasi serius lainnya.

Amerika Serikat, menurut Habiburokman, memiliki fokus antara lain pada narkoba, fraud, korupsi, dan tindak pidana teror organisasi lainnya. Semen-

tara itu, Australia dan Inggris menerapkan perampasan aset tanpa jalur pidana terhadap kasus-kasus besar yang ditangani oleh pengadilan dengan tingkat kewenangan lebih tinggi.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa setiap negara memiliki batasan dan mekanisme berbeda dalam merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Karena itu, Komisi III menilai pengalaman negara lain perlu dipelajari tanpa mengabaikan karakter sistem hukum dan kebutuhan penegakan hukum di Indonesia.

Habiburokman menegaskan RUU Perampasan Aset harus mampu memberikan kepastian sekaligus menjamin keadilan. Menurut dia, efektivitas aturan perlu berjalan beriringan dengan prinsip proporsionalitas agar kewenangan negara dalam mengambil aset tetap berada dalam koridor hukum.

“Para ahli hukum menyampaikan bahwa tindak pidana yang diatur sebaiknya merupakan tindak pidana yang bermotif ekonomi, merugikan negara dan masyarakat luas, atau memiliki tingkat keseriusan tinggi dan berdampak pada publik secara ekonomi,” ujarnya.

Komisi III juga membuka ruang bagi masyarakat dan kalangan ahli untuk memberikan masukan selama proses penyusunan RUU berlangsung. Masukan tersebut dinilai penting untuk memastikan aturan yang dihasilkan tidak hanya komprehensif, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif dalam praktik penegakan hukum.

“Masukan dari masyarakat, seperti elemen masyarakat maupun para ahli, menjadi tuntutan bagi Komisi III DPR RI untuk membuat rancangan undang-undang yang partisipatif, komprehensif, dan sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara,” kata Habiburokman.

Dengan masuknya 13 kategori tindak pidana tersebut, pembahasan RUU Perampasan Aset kini diarahkan untuk menentukan batas yang jelas mengenai kejahatan dan aset yang dapat menjadi objek perampasan. Pemerintah dan DPR selanjutnya perlu memastikan rumusan akhir tetap memberikan ruang bagi pemulihan aset hasil kejahatan sekaligus menjaga prinsip due process of law dan perlindungan terhadap hak masyarakat. (*)

Draf PPHN Dibuka ke Publik, MPR Targetkan Jadi Produk Hukum pada 2027



JAKARTA, BP- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI membuka rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) kepada masyarakat mulai Sabtu (29/8) pukul 16.00 WIB. Publikasi draf tersebut menjadi tahapan penting sebelum MPR menentukan langkah hukum dan politik untuk menjadikan PPHN sebagai produk hukum yang ditargetkan selesai pada 2027.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan masyarakat dapat mengakses rancangan PPHN melalui laman resmi yang disiapkan MPR bersama Sekretariat Jenderal MPR. Pembukaan dokumen tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada publik menelaah substansi sekaligus menyampaikan masukan.

Langkah itu dilakukan meskipun pembahasan draf di internal MPR telah mencapai tahap final di Badan Pengkajian. Menurut Muzani, penyelesaian pembahasan internal tidak berarti partisipasi masyarakat dihentikan karena pandangan publik masih dibutuhkan sebelum rancangan tersebut dibawa ke tahapan berikutnya.

“Pimpinan MPR beserta Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan yang menyusun draf rancangan PPHN telah menyepakati bahwa mulai besok jam 16.00 sore, rancangan tentang PPHN sudah bisa diakses oleh masyarakat,” kata Muzani di kompleks Widya Chandra, Jakarta, Jumat (29/8).

MPR, kata Muzani, terutama mengharap masukan dari kalangan yang memiliki perhatian terhadap persoalan ketatanegaraan. Perguruan tinggi, akademisi, organisasi, maupun masyarakat secara perorangan dapat memberikan pandangan terhadap rancangan yang telah disusun tersebut.

Ruang partisipasi publik itu menjadi penting karena PPHN dirancang untuk memberikan arah pembangunan nasional yang melampaui satu periode pemerintahan. Gagasan tersebut berkaitan dengan kebutuhan menjaga kesinambungan pembangunan agar arah kebijakan nasional tidak sepenuhnya berubah ketika terjadi pergantian kepemimpinan nasional.

Muzani menyebut pembahasan mengenai bentuk hukum PPHN

saat ini mulai mengerucut pada opsi Ketetapan MPR (TAP MPR). Sebelumnya, terdapat tiga alternatif yang dikaji, yakni melalui TAP MPR, undang-undang, atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Pilihan TAP MPR, bagaimanapun, menghadapi persoalan konstitusional. Perubahan UUD 1945 yang berlangsung pada 1999a€“2002 mengubah secara mendasar kedudukan dan kewenangan MPR, termasuk membatasi kewenangan MPR dalam menerbitkan ketetapan yang bersifat mengatur secara luas seperti pada masa sebelum reformasi.

Karena itu, penggunaan TAP MPR sebagai dasar hukum PPHN membutuhkan kajian lebih lanjut. Muzani menyatakan opsi tersebut memiliki konsekuensi hukum karena kewenangan MPR untuk mengeluarkan TAP mengalami perubahan setelah amendemen UUD 1945 pada 2002.

Persoalan tersebut membuat MPR masih membuka forum penyerapan aspirasi sebelum menentukan formula final. Proses kajian juga terus dilakukan secara intensif untuk mencari bentuk hukum yang dinilai paling tepat dan memiliki landasan konstitusional yang kuat.

“Insyaallah tahun depan mudah-mudahan sudah bisa menjadi sebuah produk hukum. Produk hukum tersebut sedang terus kita lakukan dalam kajian-kajian yang makin intensif di antara kami,” ujar Muzani.

Secara historis, gagasan mengenai haluan negara bukan sesuatu yang sepenuhnya baru bagi Indonesia. Pada era sebelum reformasi, arah pembangunan nasional dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan MPR. Salah satu dasar pentingnya adalah TAP MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang GBHN yang menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan nasional pada masa tersebut.

Model GBHN kemudian mengalami perubahan setelah reformasi politik 1998. Melalui rangkaian amendemen UUD 1945 pada 1999 hingga 2002, sistem ketatanegaraan Indonesia bergeser dari model yang menempatkan MPR sebagai lembaga dengan kedudukan sangat dominan menuju sistem dengan pembagian kekuasaan

dan mekanisme pemilihan presiden secara langsung. Presiden juga tidak lagi berkewajiban menjalankan GBHN sebagaimana sistem sebelumnya.

Perubahan tersebut menjadi salah satu latar belakang munculnya kembali wacana PPHN dalam beberapa tahun terakhir. Gagasan PPHN diarahkan untuk mencari mekanisme agar pembangunan nasional mempunyai kesinambungan jangka panjang tanpa mengembalikan sepenuhnya sistem ketatanegaraan sebelum reformasi.

Dalam konteks internasional, perencanaan pembangunan jangka panjang juga bukan hal yang asing. Sejumlah negara menggunakan dokumen perencanaan nasional atau strategi pembangunan lintas pemerintahan untuk menjaga kesinambungan kebijakan. Korea Selatan, misalnya, secara historis menggunakan rencana pembangunan ekonomi lima tahunan sejak 1960-an sebagai instrumen untuk mengarahkan transformasi ekonomi nasional.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kesinambungan pembangunan dapat ditempuh melalui berbagai model kelembagaan sesuai dengan sistem politik dan konstitusi masing-masing negara. Karena itu, rancangan PPHN Indonesia tetap harus disesuaikan dengan prinsip konstitusional yang berlaku setelah reformasi.

Muzani menegaskan bahwa PPHN yang sedang dibahas MPR bukan konsep yang hanya ditujukan untuk satu pemerintahan. Menurut dia, arah yang ingin dibangun melalui PPHN harus memiliki jangkauan lebih panjang sehingga tidak berhenti pada pergantian kepemimpinan nasional.

“PPHN adalah konsep yang melewati batas kepresidenan,” kata Muzani.

Publikasi draf pada Sabtu (29/8) menjadi pintu bagi masyarakat untuk ikut menguji substansi rancangan tersebut. Setelah masukan dihimpun, MPR akan melanjutkan kajian mengenai materi PPHN sekaligus menentukan instrumen hukum yang paling sesuai.

Dengan target menjadikan PPHN sebagai produk hukum pada 2027, proses yang berlangsung saat ini tidak hanya menyangkut penyusunan dokumen pembangunan. Perdebatan juga menyentuh desain ketatanegaraan pascareformasi, batas kewenangan MPR, serta kebutuhan menjaga kesinambungan pembangunan nasional dalam jangka panjang. (*)

Enam Calon Sekda Sultra Lolos Administrasi, Ada dari Kendari, Konsel hingga Sulbar, Ini Dia Nama-namanya



Laporan: Mashuri

SULTRA, BP- ” Persaingan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara memasuki tahapan berikutnya setelah panitia seleksi menetapkan enam pejabat yang dinyatakan lulus administrasi. Keenam kandidat tersebut berasal dari lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kota Kendari, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, hingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Penetapan enam nama itu diumumkan Panitia Seleksi Pengisian JPT Madya Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Pengumuman Nomor 08/SELTAR/JPTM/VIII/2026 tertanggal 27 Agustus 2026 di Kendari. Pengumuman tersebut didasarkan pada Keputusan Ketua Panitia Seleksi Nomor 07/SELTAR/JPTM/VIII/2026 tentang penetapan peserta yang memenuhi syarat dan lulus seleksi administrasi.

Dari enam kandidat, tiga di antaranya tercatat berasal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni La Ode Muhammad Rusdin Jaya, Muhammad Fadlansyah, dan Parinringi. Dua kandidat lainnya masing-masing berasal dari Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dan Pemerintah Kota Kendari, sementara satu kandidat berasal dari Pemerintah

Provinsi Sulawesi Barat.

La Ode Muhammad Rusdin Jaya tercatat sebagai Pembina Utama Muda, IV/c, dengan NIP 198005222006041014. Muhammad Fadlansyah juga berpangkat Pembina Utama Muda, IV/c, dengan NIP 197412271993111001. Sementara itu, Parinringi berpangkat Pembina Utama Madya, IV/d, dengan NIP 197710142003121007.

Kandidat dari daerah lain adalah Marwiyah Tombili, pejabat Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dengan pangkat Pembina Utama Muda, IV/c, serta Syarifuddin, pejabat Pemerintah Kota Kendari yang juga berpangkat Pembina Utama Muda, IV/c. Adapun Suyuti berasal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan pangkat Pembina Utama Muda, IV/c.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa proses seleksi tidak hanya diikuti pejabat dari lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Pejabat dari pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan bahkan provinsi tetangga ikut masuk dalam persaingan untuk menduduki posisi Sekretaris Daerah Sultra. “Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi agar segera melapor pada Sekretariat Panitia Seleksi,” demikian ketentuan yang tercantum dalam pengumuman panitia.

Setelah lolos administrasi, keenam peserta akan menghadapi penilaian kompetensi melalui Assessment Center. Tahapan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa-Kamis, 1-3 September 2026, mulai pukul 08.00 WIB sampai selesai di Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur.

Rangkaian seleksi kemudian berlanjut di Kendari. Penulisan makalah dijadwalkan pada Rabu, 9 September 2026, pukul 08.00 WITA hingga selesai di Hotel Claro,

Jalan Edi Sabara Nomor 89, Kendari. Sehari berikutnya, Kamis, 10 September 2026, para kandidat dijadwalkan mengikuti presentasi dan wawancara di tempat yang sama.

Panitia menegaskan bahwa rangkaian tersebut menjadi bagian dari proses untuk mengukur kapasitas para kandidat sebelum tahapan akhir pengisian jabatan. “Jadwal pelaksanaan sewaktu-waktu dapat berubah dan akan diinformasikan selanjutnya,” demikian catatan yang disampaikan panitia dalam pengumuman resmi.

Peserta juga diwajibkan membawa dokumen asli ketika mengikuti penulisan makalah. Dokumen yang harus disiapkan antara lain rekomendasi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), surat keterangan sehat jasmani dan jiwa, serta surat keterangan bebas narkoba. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari kelengkapan proses seleksi setelah tahapan administrasi dinyatakan selesai.

Secara historis, mekanisme seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi merupakan bagian dari perubahan tata kelola birokrasi Indonesia pascareformasi. Penguatan sistem merit dalam birokrasi antara lain mendapatkan landasan melalui UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang kemudian diperbarui melalui UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Sistem tersebut menempatkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai aspek penting dalam pengembangan karier aparatur.

Di tingkat internasional, prinsip pengisian jabatan publik berbasis merit telah lama digunakan dalam reformasi administrasi negara di berbagai negara. Gagasan tersebut bertujuan mengurangi pengaruh patronase dan memastikan posisi strategis pemerintahan diisi berdasarkan kapasitas serta rekam kompetensi. Dalam konteks Indonesia, penerapan sistem merit menjadi salah satu instrumen untuk membangun birokrasi yang profesional, netral, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dengan enam peserta yang telah melewati seleksi administrasi, proses perebutan jabatan Sekda Sultra kini memasuki tahap penilaian kompetensi dan kemampuan substantif. Hasil dari rangkaian Assessment Center, penulisan makalah, presentasi, dan wawancara akan menjadi bagian penting dalam proses menentukan kandidat terbaik untuk mengisi posisi strategis dalam struktur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. “Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi selanjutnya wajib mengikuti seluruh tahapan sesuai jadwal dan ketentuan panitia.(*)

Pemkot Kendari Siapkan Rp500 Juta untuk Beasiswa 85 Mahasiswa hingga S3

Laporan: Lisna

KENDARI, BP- Pemerintah Kota Kendari menyiapkan anggaran sekitar Rp500 juta untuk program beasiswa pendidikan bagi 85 mahasiswa pada 2026. Bantuan tersebut mencakup mahasiswa jenjang D3/D4 dan S1, hingga mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan S2 dan S3.

Program bernama Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa Kendari Semakin Maju itu disiapkan untuk memperluas akses dukungan pendidikan tinggi. Pemkot Kendari kini mematangkan tahapan penerimaan agar bantuan dapat disalurkan secara terbuka, terukur, dan sesuai ketentuan.

Dari total 85 penerima yang ditargetkan, sebanyak 50 mahasiswa dialokasikan untuk jenjang D3, D4, dan S1. Sementara itu, 20 penerima berasal dari jenjang S2 dan 15 lainnya merupakan mahasiswa S3.

Persiapan teknis program dibahas dalam rapat yang dipimpin Asisten I Sekretariat Daerah Kota Kendari Adriana Musarudin di Ruang Rapat Sekda Kota Kendari, Jumat (28/8/2026). Sejumlah perangkat daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan program turut mengikuti rapat tersebut.

Adriana meminta seluruh tahapan dipersiapkan secara matang sebelum program diumumkan kepada masyarakat. Pemerintah, kata dia, harus memastikan kesiapan anggaran sekaligus menentukan jadwal publikasi, penerimaan proposal, proses verifikasi, hingga penetapan penerima.

“Kita harus tahu mulai kapan dan sampai kapan publikasi ini harus dilaksanakan, untuk menjaga transparansi, dan bisa diketahui masyarakat,” kata Adriana.

Transparansi menjadi penting karena program tersebut memberikan kesempatan kepada mahasiswa dengan latar belakang berbeda. Pemkot tidak hanya menyediakan kategori bagi mahasiswa berprestasi secara akademik, tetapi juga membuka ruang bagi mahasiswa kurang mampu dan mereka yang memiliki prestasi nonakademik.

Ketentuan program telah dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2026. Regulasi tersebut menjadi dasar pengaturan mekanisme, persyaratan, serta pelaksanaan pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Kendari Sapri mengatakan beasiswa mahasiswa umum tersebut merupakan program yang berbeda dari bantuan pendidikan bagi pelajar SD-SMP maupun program beasiswa untuk pegawai. Pelaksanaannya berada di bawah pengelolaan Bagian Kesra Kota Kendari.

Syarat kelembagaan perguruan tinggi menjadi salah satu ketentuan penting dalam program tersebut. Mahasiswa hanya dapat memperoleh beasiswa apabila perguruan tinggi tempat mereka menempuh pendidikan telah memiliki Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemkot Kendari.

“Kalau tidak ada MoU dan PKS secara kelembagaan, maka mahasiswa tidak dapat diberikan beasiswa dari Pemkot,” ujar Sapri.

Berdasarkan kategorinya, calon penerima beasiswa dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, mahasiswa dengan prestasi akademik. Kedua, mahasiswa yang masuk kategori tidak mampu. Ketiga, mahasiswa yang mempunyai prestasi nonakademik.

Untuk kategori akademik, calon penerima harus mempunyai IPK minimal 3,50. Adapun mahasiswa yang mengajukan diri melalui kategori tidak mampu diwajibkan mempunyai IP minimal 2,75 serta melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau dokumen pendukung seperti kepesertaan Program

Keluarga Harapan (PKH).

Sementara itu, kategori prestasi nonakademik ditujukan kepada mahasiswa yang meraih juara 1, 2, atau 3 pada tingkat kota, provinsi, maupun internasional. Prestasi yang dapat menjadi dasar pengajuan antara lain bidang olahraga, Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), dan bidang prestasi lainnya sesuai ketentuan program.

Calon penerima juga harus memenuhi persyaratan umum. Mereka wajib memiliki KTP Kota Kendari, berstatus mahasiswa aktif pada perguruan tinggi negeri atau swasta, bukan PNS, bukan anggota partai politik atau calon anggota legislatif, serta tidak sedang menjalani sanksi pidana.

Batas usia turut diberlakukan sesuai jenjang pendidikan. Untuk jenjang D4, batas usia maksimal 27 tahun, sedangkan mahasiswa S2 maksimal 45 tahun dan mahasiswa S3 maksimal 50 tahun. Mahasiswa perguruan tinggi kedinasan, mahasiswa yang sedang cuti kuliah, serta mereka yang telah menerima beasiswa dari pihak lain tidak dapat mengikuti program tersebut.

Pemkot juga memberikan penjelasan mengenai status pekerjaan orang tua. Mahasiswa yang orang tuanya berstatus ASN tidak otomatis gugur dari seleksi. Anak ASN tetap mempunyai peluang menjadi penerima sepanjang memenuhi seluruh persyaratan dan mahasiswa yang bersangkutan bukan ASN.

Kebijakan tersebut sejalan dengan perkembangan perhatian pemerintah terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Secara nasional, dukungan pembiayaan pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu antara lain diperkuat melalui Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi atau KIP Kuliah yang mulai dikembangkan pemerintah pada 2020 sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan tinggi.

Dalam konteks yang lebih luas, bantuan pendidikan juga telah menjadi instrumen kebijakan di berbagai negara. Program beasiswa internasional Erasmus Mundus, misalnya, dikembangkan Uni Eropa sejak 2004 untuk mendukung mobilitas dan pendidikan tinggi lintas negara. Perkembangan berbagai program tersebut menunjukkan bahwa dukungan pembiayaan pendidikan dipandang sebagai salah satu cara memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagi Kendari, program beasiswa 2026 tersebut diarahkan untuk memberikan dukungan pada mahasiswa yang memiliki prestasi sekaligus mahasiswa yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Dengan alokasi 85 penerima, Pemkot berharap bantuan tidak berhenti pada aspek pembiayaan, tetapi turut membantu mahasiswa mempertahankan keberlanjutan studinya hingga menyelesaikan pendidikan.

Tahapan berikutnya adalah memastikan informasi program dapat diakses masyarakat secara luas. Setelah proses publikasi, calon penerima akan mengikuti mekanisme pengajuan dan verifikasi sesuai ketentuan sebelum pemerintah menetapkan mahasiswa yang berhak memperoleh beasiswa.

Sapri menegaskan bahwa pemenuhan seluruh persyaratan menjadi faktor utama dalam menentukan penerima. Dengan demikian, mahasiswa yang berminat perlu memperhatikan ketentuan mengenai status pendidikan, kategori beasiswa, persyaratan perguruan tinggi, batas usia, serta dokumen pendukung yang diwajibkan.

Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemkot Kendari memperkuat investasi sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi. Pemerintah daerah berharap mahasiswa penerima bantuan dapat menyelesaikan pendidikan secara berkelanjutan dan pada akhirnya berkontribusi terhadap pembangunan Kota Kendari.(*)

Afrudin menutup pesannya dengan harapan agar Kabupaten Buton Utara senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT, serta diberikan kedamaian, persatuan, kemajuan, dan kesejahteraan. (*)

Pemkab Buton Utara Perkuat Pencegahan Penyakit, Dorong Sinergi Lintas Sektor



Laporan: Ardi

BURANGA, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, memperkuat strategi pencegahan dan pengendalian penyakit dengan melibatkan berbagai sektor pemerintahan dan pemangku kepentingan. Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Tahun 2026 di Aula Hotel Saraea, Kecamatan Kulisu, Kamis (27/8).

Rapat koordinasi itu dibuka Wakil Bupati Buton Utara Rahman, SKM., M.Kes., dengan agenda utama mengevaluasi capaian program, memastikan akurasi data kesehatan, serta menyatukan langkah antarsektor untuk menekan angka kesakitan masyarakat.

Rahman menilai kompleksitas persoalan kesehatan membuat pendekatan pelayanan tidak bisa lagi bertumpu pada pengobatan. Pemerintah daerah bersama tenaga kesehatan dan sektor terkait perlu memperbesar porsi pencegahan, deteksi dini, serta pengendalian berbagai faktor risiko penyakit.

“Fokus pelayanan kesehatan tidak lagi hanya pada aspek pengobatan, tetapi harus bergeser lebih kuat pada upaya pencegahan, deteksi dini, serta pengendalian faktor risiko penyakit,” ujar Rahman dalam rakor tersebut.

Ia mengatakan penyakit menular masih menjadi salah satu persoalan yang membutuhkan perhatian serius. Pada saat bersamaan, penyakit tidak menular terus menunjukkan kecenderungan meningkat dan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat.

Menurut Rahman, persoalan tersebut tidak dapat ditangani oleh Dinas Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan secara sendiri-sendiri. Diperlukan koordinasi antara pemerintah, fasilitas kesehatan, sektor pendidikan, pemerintahan desa, organisasi kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan lainnya agar intervensi kesehatan menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Rakor P2P 2026 diikuti sejumlah unsur pemerintah dan pemangku kepentingan. Hadir Kepala Kantor Kementerian Agama Buton Utara, Kepala Bappeda Buton Utara, Ketua TP-PKK Buton Utara, serta para kepala organisasi perangkat daerah terkait.

Perangkat daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kominfo dan Persandian, Dinas Dukcapil, serta Dinas Sosial. Keterlibatan lintas sektor tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas dukungan terhadap program pencegahan dan pengendalian penyakit.

Selain unsur pemerintah daerah, hadir pula Direktur RSUD Buton Utara, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton Utara, para camat se-Kabupaten Buton Utara, Kepala BPJS Kesehatan Buton Utara, para kepala puskesmas, dan Kepala UPTD Laboratorium Daerah Kesehatan Masyarakat Buton Utara.

Para penanggung jawab program dari seluruh puskesmas juga mengikuti kegiatan tersebut. Sementara itu, materi dan perspektif teknis diperkuat narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara serta Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Buton Utara.

“Sinergi lintas sektor menjadi bagian penting karena upaya pencegahan penyakit tidak hanya berlangsung di fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga membutuhkan dukungan lingkungan, pendidikan, pemerintahan desa, dan masyarakat,” kata Rahman.

Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Buton Utara menargetkan koordinasi program kesehatan menjadi

Kebijakan tersebut juga memiliki pijakan regulasi daerah. Pemerintah Kabupaten Buton Utara telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Penyakit Menular sebagai dasar penyelenggaraan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular.

Keberadaan perda tersebut mencerminkan bahwa penyakit menular telah dipandang sebagai persoalan kesehatan masyarakat yang memerlukan penanganan terencana. Penyakit menular dapat menyebabkan kesakitan, kematian, dan cacatan sehingga intervensinya perlu dilakukan secara efektif dan efisien.

Secara historis, pendekatan pencegahan penyakit memang menjadi bagian penting dalam perkembangan kesehatan masyarakat modern. Di tingkat internasional, keberhasilan vaksinasi dan berbagai program pengendalian penyakit menular telah menunjukkan bahwa pencegahan dapat mengurangi beban penyakit secara signifikan. Pemberantasan cacar yang dinyatakan berhasil secara global pada 1980 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah kesehatan dunia.

Di Indonesia, pendekatan serupa juga berkembang melalui berbagai program kesehatan masyarakat, mulai dari imunisasi, pemberantasan penyakit menular, hingga penguatan layanan kesehatan primer. Perubahan beban penyakit kemudian membuat perhatian kesehatan masyarakat semakin luas, termasuk terhadap penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, stroke, diabetes, dan kanker.

Dalam konteks Buton Utara, perubahan pola ancaman kesehatan tersebut menuntut pemerintah daerah memiliki data yang akurat sebagai dasar menentukan prioritas. Data yang valid diperlukan untuk mengetahui capaian program sekaligus mengidentifikasi kelompok dan wilayah yang membutuhkan intervensi lebih lanjut.

Karena itu, Rahman meminta rakor tidak berhenti pada penyampaian laporan program. Forum tersebut harus digunakan untuk menguji capaian, memperbaiki kualitas data, dan membangun kesamaan persepsi antarinstansi.

“Saya sangat berharap rapat ini dapat berjalan dengan produktif. Jadikan forum diskusi nanti sebagai ajang untuk mengevaluasi capaian, memvalidasi data dengan akurat, dan menyamakan persepsi antar lintas sektor demi menekan angka kesakitan di Buton Utara,” katanya.

Asap Karhutla Ancam 10,67 Juta Warga, Kemenkes Siagakan 848 Nakes



JAKARTA, BP- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengerahkan 848 tenaga kesehatan untuk memperkuat penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda tujuh provinsi. Mobilisasi dilakukan setelah asap dan partikulat memicu ribuan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) serta mengancam kelompok masyarakat rentan.

Berdasarkan Situation Report Kemenkes per 27 Agustus 2026, karhutla telah berdampak terhadap 10.674.201 penduduk di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan. Sebanyak 123 orang tercatat mengalami luka berat atau menjalani rawat inap dan dua orang menjalani rawat jalan. Hingga laporan tersebut diperbarui, tidak terdapat korban meninggal dunia maupun pengungsi.

Kemenkes mencatat 4.082 kasus ISPA pada 27 Agustus 2026 sehingga akumulasi kasus mencapai 13.449 kasus. Gangguan kesehatan lainnya yang berpotensi muncul akibat paparan asap antara lain batuk, sesak napas, radang tenggorokan, asma, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), serta iritasi mata dan kulit. Anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita asma atau PPOK, dan pekerja luar ruangan menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus.

“Karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, terutama akibat paparan asap dan partikulat. Karena itu, kita perlu memastikan masyarakat terlindungi dan pelayanan kesehatan tetap siap,” kata Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. Dante Saksono Harbuwono dalam media briefing di Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Tekanan terhadap kesehatan masyarakat sejalan dengan memburuknya kualitas udara di sejumlah daerah. Pemantauan ISPU pada 27 Agustus 2026 pukul 16.26 WIB mencatat Pontianak, Kalimantan Barat, berada pada angka 328 atau kategori berbahaya. Kabupaten Tebo, Jambi, mencapai 287, Barito

Selatan 274, Katingan 258, dan Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, 255. Wilayah-wilayah tersebut berada dalam kategori sangat tidak sehat dengan PM2.5 sebagai parameter kritis.

Respons kesehatan diperkuat dengan menyiagakan 1.691 puskesmas, 360 rumah sakit rujukan, dan 87 Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Pemerintah daerah juga memobilisasi 394.385 masker, 56 oksigen konsentrator, 1.000 pasang handscoon, 103 tabung Oxycan, 40 dus makanan tambahan, 36 face shield, dan delapan APD. Sementara Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes menyalurkan 432.000 masker, 169 oksigen konsentrator, 40.000 handscoon, 4.900 APD, serta tiga air purifier.

Provinsi Riau menjadi salah satu wilayah dengan tekanan kesehatan cukup besar. Hingga 27 Agustus 2026, karhutla telah berdampak di 12 kabupaten/kota dengan sekitar 3.293 kasus ISPA. Kota Pekanbaru mencatat sekitar 900 kasus, Pelalawan sekitar 600 kasus, disusul Kabupaten Kampar. Dinas Kesehatan Riau mengaktifkan Emergency Medical Team (EMT) di 244 puskesmas dan menyiagakan dukungan oksigen.

“Untuk tindakan preventif, kami sudah membagikan sekitar 69.000 masker di 12 kabupaten/kota. Khusus di Pelalawan, kami sudah dropping 28.000 masker,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli. Ia juga meminta masyarakat, terutama kelompok rentan, mengurangi aktivitas di luar rumah dan memakai masker ketika harus beraktivitas di luar.

Karhutla dan dampak asap bukan persoalan baru bagi Indonesia. Bencana kabut asap 1997-1998 menjadi salah satu episode terburuk dalam sejarah kebakaran hutan dan lahan di kawasan Asia Tenggara, sementara krisis asap 2015 kembali menunjukkan besarnya konsekuensi kesehatan dan lingkungan dari kebakaran lahan. Secara global, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga menempatkan polusi udara sebagai salah satu risiko kesehatan lingkungan utama. Dalam konteks kondisi terkini, Kemenkes meminta masyarakat memantau kualitas udara, mengurangi aktivitas luar ruangan saat udara memburuk, menggunakan masker dan pelindung mata, menjaga hidrasi, serta segera mencari pertolongan medis apabila mengalami batuk, sesak napas, atau iritasi mata. (*)

lebih terarah. Evaluasi capaian, validasi data, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko diharapkan dapat menjadi pijakan dalam memperkuat intervensi kesehatan masyarakat sepanjang 2026.

Dengan demikian, pengen-

dalian penyakit di Buton Utara tidak semata-mata diarahkan untuk menangani masyarakat yang telah sakit, tetapi juga mencegah munculnya kasus baru. Pergeseran orientasi tersebut menjadi penting agar pembangunan kesehatan daerah dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. (*)



KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik

Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi

Pemimpin Umum: Fauzan NWA
Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi
Redpel: Prasetyo
Korlip: Firman
Redaktur: Kasrun,Rahim
Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman

Layouter: Rinin
Pracetak: Aditya
Cetak Jamaludin

Penerbit: PT FAREN GRAFIKA
Komisaris: Erna Agule
Direktur Utama: Andina Latief
Manager Keuangan: Nabila DAA
Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin
Kepala Sirkulasi: Robi
Administrasi: Salvana

Kepala Biro Wakatobi: Risman
Kepala Biro Buton Utara: Kasrun
Kepala Biro Buton: La Harman
Kepala Biro Buton Selatan: Firman
Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin
Kepala Biro Sultra: Masuri

Agen Baubau: Jamaluddin
Agen Buton Selatan: Firman
Agen Buton: Samrihan
Agen Buton Utara: Kasrun

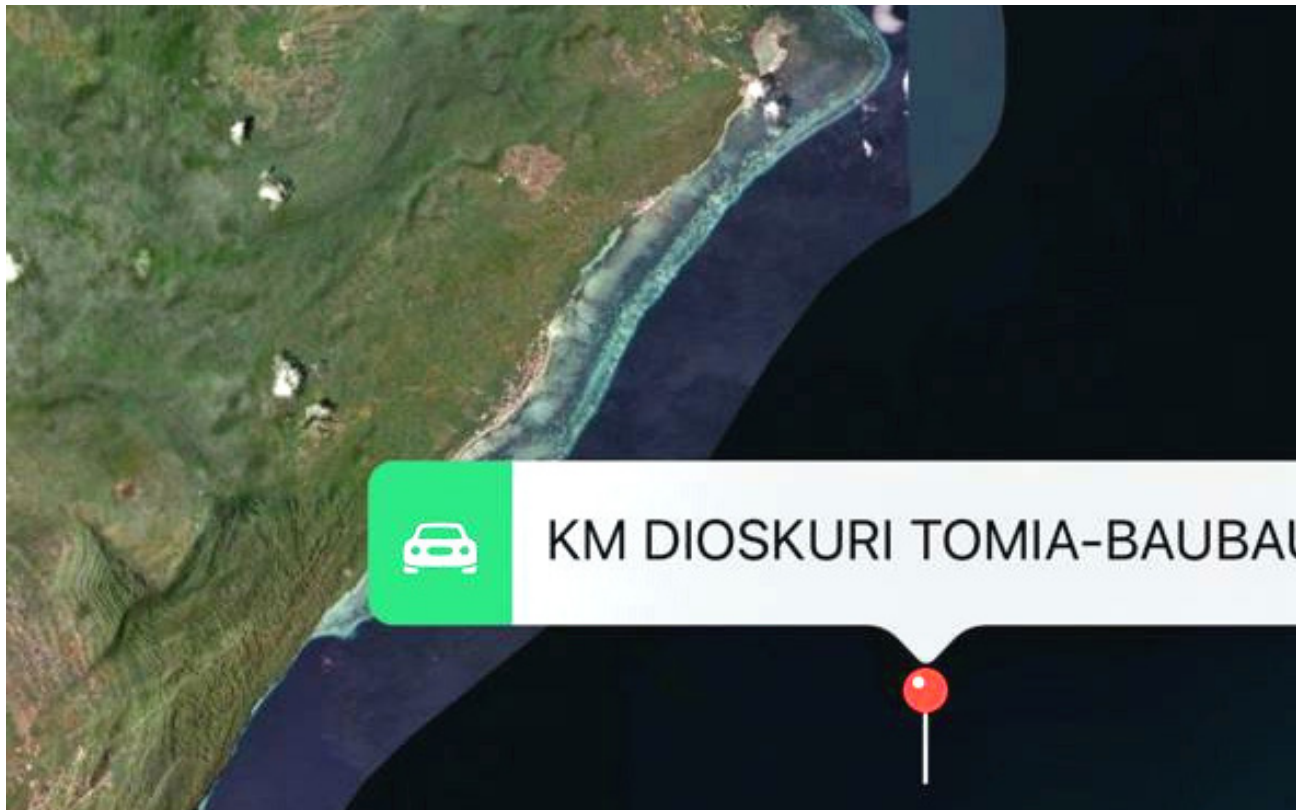
Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan,

Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks

Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara
Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com

Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat:Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

Gangguan Mesin di Perairan Wabula, Seluruh Penumpang KM Dioskuri Selamat



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP- Gangguan mesin KM Dioskuri di perairan Wabula, Kabupaten Buton, Senin (24/8/2026) malam, berakhir tanpa korban jiwa. Kapal penumpang yang melayani rute Tomia- Baubau itu berhasil ditarik ke Pelabuhan Pasarwajo pada Selasa (25/8/2026) dini hari, sebelum seluruh penumpang meneruskan perjalanan melalui jalur darat dan tiba di rumah masing-masing di Kota Baubau.

Kepastian keselamatan penumpang diperoleh setelah BPBD Kota Baubau melakukan konfirmasi berulang sejak informasi gangguan kapal diterima. Penanganan melibatkan Pos Pencarian dan Pertolongan (SAR) Baubau, Kepolisian Resor Buton, PT Triko, serta sejumlah pihak terkait yang bekerja hingga dini hari.

Gangguan terjadi karena kerusakan mesin yang menyebabkan KM Dioskuri hanya dapat mengoperasikan satu mesin. Akibatnya, kecepatan kapal turun drastis menjadi sekitar 2-3 knot. Saat mengalami gangguan, kapal berada kurang lebih 12 mil laut dari Pasar Wabula.

Informasi awal mengenai kondisi kapal diterima sekitar pukul 22.30 Wita oleh Wakil Wali Kota Baubau Hamsina Bolu. Ia kemudian meminta BPBD Kota Baubau melakukan pemantauan, mengambil langkah penanganan yang diperlukan, dan melaporkan perkem-

bangan situasi secara berkala.

Plh. Kalaks BPBD Kota Baubau Dr. Mohamad Tasdik, M.Si., bersama anggota BPBD segera berkoordinasi dengan Pos SAR Baubau. Untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi di atas kapal, Tasdik juga menghubungi salah seorang penumpang melalui sambungan telepon. Dari komunikasi tersebut diketahui bahwa kerusakan mesin memang terjadi, tetapi seluruh penumpang berada dalam keadaan aman dan terkendali.

“Begitu informasi diterima dari Ibu Wakil Wali Kota, kami langsung bergerak, membuka komunikasi dengan Pos SAR Baubau, sekaligus mengonfirmasi langsung ke penumpang di atas kapal,” ujar Tasdik.

Setelah kondisi kapal diketahui, upaya penarikan segera dilakukan. Polres Buton bersama PT Triko mengerahkan kapal untuk menarik KM Dioskuri menuju Pelabuhan Pasarwajo. Operasi tersebut berlangsung hingga dini hari dan kapal akhirnya berhasil disandarkan dengan aman sekitar pukul 03.00 Wita.

Setelah kapal berada di pelabuhan, sekitar pukul 04.00 Wita seluruh penumpang melanjutkan perjalanan menuju Kota Baubau menggunakan kendaraan roda empat. BPBD Kota Baubau kemudian melakukan konfirmasi lanjutan kepada penumpang untuk memastikan proses pemulangan berjalan dengan baik.

Hasil konfirmasi

tersebut memastikan seluruh penumpang KM Dioskuri telah tiba di rumah masing-masing di Kota Baubau dalam keadaan selamat. Tidak terdapat laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Tasdik mengatakan keberhasilan penanganan tidak terlepas dari kecepatan pertukaran informasi dan koordinasi lintas instansi. Menurut dia, situasi gangguan kapal di tengah laut membutuhkan keputusan cepat sekaligus informasi yang akurat agar langkah penyelamatan dapat dilakukan secara terukur.

“Prinsipnya, dalam situasi seperti ini kecepatan informasi dan kejelasan alur koordinasi sama pentingnya dengan peralatan,” katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pos SAR Baubau, Polres Buton, PT Triko, serta pihak lain yang terlibat dalam penanganan tersebut. “Malam itu semuanya bekerja sampai dini hari, dan hasilnya nihil korban jiwa. Itu capaian bersama,” ujar Tasdik.

Peristiwa KM Dioskuri kembali menunjukkan pentingnya kesiapan teknis kapal sebelum berlayar. Gangguan mesin yang terjadi di tengah pelayaran dapat berkembang menjadi persoalan keselamatan apabila tidak segera ditangani, terutama ketika kapal berada jauh dari pelabuhan dan membutuhkan bantuan dari kapal lain.

Keselamatan pelayaran sendiri memiliki sejarah panjang dalam regulasi inter-

nasional. Salah satu tonggak pentingnya adalah tragedi Titanic pada April 1912 yang menewaskan sekitar 1.500 orang. Dua tahun kemudian, negara-negara maritim berkumpul di London dan mengadopsi International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) pada 20 Januari 1914. Konvensi tersebut kemudian berkembang melalui sejumlah revisi hingga SOLAS 1974 yang diadopsi pada 1 November 1974 dan mulai berlaku pada 25 Mei 1980.

Di Indonesia, keselamatan dan penyelenggaraan pelayaran juga memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang ditetapkan pada 7 Mei 2008. Regulasi tersebut saat ini tercatat telah mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024.

BPBD Kota Baubau mengingatkan operator dan awak kapal agar memastikan kondisi mesin, kelaikan kapal, serta seluruh peralatan keselamatan sebelum keberangkatan. Penumpang juga diminta menggunakan angkutan resmi, mengikuti instruksi awak kapal, tidak panik ketika terjadi gangguan, serta segera melaporkan kondisi yang berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran kepada BPBD, Pos SAR, atau aparat kepolisian terdekat. (*)

Pemilik Kasino Batam Dijerat TPPU, Polisi Dalam Aliran Uang Rp7,7 Miliar



Laporan: Hadi

JAKARTA, BP- Bareskrim Polri memperluas penyidikan kasus perjudian kasino di Nine Stage Lounge and Bar, Batam, Kepulauan Riau, dengan menjerat pemiliknya, Suwanda alias Akau, menggunakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Langkah tersebut dilakukan setelah polisi menyita uang tunai Rp7,7 miliar dan mengungkap struktur operasional kasino yang melibatkan 197 orang.

Wakabareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin mengatakan Suwanda tidak hanya diproses atas dugaan tindak pidana perjudian. Penyidik juga menerapkan ketentuan pidana terkait pencucian uang untuk menelusuri aspek keuangan yang berkaitan dengan aktivitas kasino tersebut.

“Tersangka atas nama Suwanda alias Akau selain dikenakan tindak pidana terkait perjudian kasino juga dikenakan pidana terkait pencucian uang,” ujar Nunung dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/8).

Pengembangan perkara dilakukan setelah Bareskrim menggerek Nine Stage Lounge and Bar di Ruko Nagoya Indah, Batam, pada Sabtu (15/8). Dalam operasi itu, aparat mengamankan 197 orang yang berada di lokasi dan menyita uang tunai senilai Rp7,7 miliar.

Jumlah orang yang diamankan tersebut kemudian dipetakan berdasarkan perannya. Polisi mengidentifikasi Suwanda sebagai pemilik, dua orang sebagai manajer, lima kasir, satu pengawas, serta 25 orang yang bertugas sebagai penukar chip.

Selain itu, penyidik menemukan 65 dealer atau bandar, dua orang marketing, dan 96 pemain. Dari kelompok pemain tersebut, 10 orang merupakan warga negara asing, sedangkan 86 lainnya berkebangsaan Indonesia.

Sepuluh warga negara asing yang diamankan terdiri atas tujuh warga negara China, dua warga negara Singapura, dan satu warga negara Malaysia. Keberadaan pemain dari sejumlah negara tersebut menjadi salah satu fakta yang terungkap dalam penggerebekan kasino di kawasan Batam.

“Rinciannya yakni tujuh warga negara China, dua warga negara Singapura, dan satu warga negara Malaysia. Sedangkan 86 lainnya WNI,” kata Nunung.

Pengungkapan kasino tersebut merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan polisi selama hampir tiga bulan. Penyelidikan tidak hanya berangkat dari laporan masyarakat, tetapi juga informasi yang diperoleh jajaran kepolisian di Batam serta pemantauan terhadap informasi yang berkembang di media.

“Penindakan ini berawal bukan hanya dari informasi masyarakat saja, tapi juga informasi dari rekan-rekan saya yang ada di Batam, dari media. Kemudian kita mengambil satu langkah untuk melakukan penggerebekan atau penindakan ak-

tivitas perjudian jenis casino,” ujar Nunung.

Dalam penggerebekan itu, polisi turut mengamankan sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk menunjang aktivitas perjudian. Barang bukti tersebut meliputi 16 mesin tembak atau bubble, 54 mesin skater, 22 mesin mahyong, satu mesin dadu, dan 14 mesin tembak ikan.

Untuk memperdalam penyidikan, Satresmob Bareskrim Polri membawa sembilan tersangka utama, termasuk Suwanda alias Akau, dari Batam ke Jakarta pada Selasa (18/8). Para tersangka selanjutnya menjalani pemeriksaan secara intensif di Mabes Polri.

Kasat Resmob Bareskrim Polri Kombes Arsyah Khadafi mengatakan penyidik masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut. Selain pemeriksaan terhadap para tersangka, tim gabungan juga melakukan penggeledahan di sebuah rumah mewah di Garden Avenue Residence, Cluster Rosewood, Bangkok, Batam.

“Untuk hasilnya akan disampaikan nanti pada saat rilis lanjutan,” tutur Arsyah.

Penerapan pasal TPPU dalam perkara tersebut menempatkan aspek aliran dana sebagai bagian penting dalam penyidikan. Selain membuktikan dugaan tindak pidana asal berupa perjudian, penyidik perlu mendalami hubungan antara aktivitas tersebut dengan aset atau transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan hasil kejahatan.

Di Indonesia, tindak pidana pencucian uang telah memiliki payung hukum khusus melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kerangka hukum tersebut memperkuat upaya aparat untuk tidak hanya mengejar pelaku tindak pidana asal, tetapi juga menelusuri dan memutus pemanfaatan hasil kejahatan.

Penggunaan pendekatan keuangan dalam pemberantasan kejahatan juga berkembang secara internasional. Financial Action Task Force (FATF), yang dibentuk pada 1989, menjadi salah satu lembaga internasional yang mendorong negara-negara memperkuat sistem pencegahan pencucian uang. Industri kasino dan perjudian termasuk sektor yang mendapat perhatian dalam rezim pencegahan pencucian uang karena dapat digunakan untuk menyamaran asal-usul dana.

Dalam konteks kasus Batam, penyidikan terhadap Suwanda masih berfokus pada pembuktian dugaan perjudian sekaligus penelusuran aspek pencucian uang. Polisi belum menyampaikan secara rinci hasil penggeledahan maupun pola transaksi yang menjadi dasar penerapan pasal TPPU. Hasil pendalaman tersebut dijanjikan akan disampaikan dalam rilis lanjutan Bareskrim Polri. (*)

Lebih 60 Hari Tanpa Hujan, El Nino Kuat Kepung Baubau, BPBD Rapatkan Barisan Mitigasi



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP- Kota Baubau mulai menghadapi tekanan kekeringan seiring menguatnya fenomena El Nino dan fase positif Indian Ocean Dipole (IOD). Kecamatan Bungi menjadi wilayah dengan kondisi paling men-colok setelah tercatat mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari, sementara BPBD Kota Baubau memperkuat kesiapsiagaan untuk mengantisipasi krisis air, kebakaran, pohon tumbang, dan gangguan aktivitas laut.

Pemutakhiran data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) per 20 Agustus 2026 menunjukkan sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara berada dalam kategori Hari Tanpa Hujan (HTH) menen-gah hingga sangat panjang, yakni 11 sampai 60 hari. Sepuluh hari sebelumnya, Kota Bau-bau secara umum telah berada pada kategori HTH sangat panjang, sebelum Kecamatan Bungi masuk kategori ekstre-m panjang.

Kondisi tersebut diperkirakan belum segera berakhir. BMKG memprediksi wilayah Sulawesi Tenggara pada akhir Agustus 2026 masih berpeluang besar menerima curah hujan kategori rendah, maksimal 50 milimeter per dasarian. Kondisi kering itu diperkirakan berlanjut hingga pertengahan September 2026.

Di tingkat global, situasi tersebut berkaitan dengan dinamika El Nino, yakni pemanasan anomali suhu permukaan laut di kawasan tengah dan timur Samudra Pasifik. Fenomena itu menyebabkan pusat pertumbuhan awan bergeser menjauh dari Indonesia sehingga pasokan uap air berkurang dan curah hujan cenderung menurun. BMKG menyebut El Nino memang umum-

nya meningkatkan risiko kekeringan meteorologis di Indonesia.

Data yang digunakan BPBD menunjukkan fenomena tersebut semakin kuat pada 2026. Indeks ENSO periode Mei-Juli tercatat +1,59 atau berada dalam kategori kuat. Pada dasarnya pertama Agustus, anomali suhu muka laut di wilayah Nino 3.4 kembali meningkat menjadi +2,77, dibandingkan +2,20 pada Juli.

Tekanan terhadap pola hujan juga datang dari Samudra Hindia. Indeks IOD pada dasarnya pertama Agustus mencapai +0,457, naik dari +0,242 sebulan sebelumnya. Fase IOD positif dapat turut mengurangi pasokan uap air menuju wilayah Indonesia sehingga kondisi kemarau menjadi lebih kering ketika bekerja bersamaan dengan El Nino.

Menghadapi situasi itu, BPBD Kota Baubau mengaktifkan posko siaga dan piket layanan kebencanaan selama 24 jam. Lembaga tersebut juga memutakhirkan peta wilayah terdampak berdasarkan kecamatan dan kelurahan, terutama untuk mengidentifikasi titik defisit air bersih, kawasan rawan kebakaran lahan, dan lokasi pohon yang berisiko tumbang.

“Sepanjang Agustus saja kami menangani kebakaran di beberapa titik, dari Palagimata, Sulaa, Waborobo, Topaz, sampai pondok pesantren di Sorawolio. Pemicunya sederhana, bakar sampah, puntung rokok, korsleting. Di musim sekering ini, kelalaian kecil bisa berubah jadi kerugian besar,” kata Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kota Baubau, Dr. Mohamad Tasdik, M.Si.

Untuk mengantisipasi kekurangan air, BPBD menyiapkan koordinasi distribusi air bersih bersama PERUMDA Air Minum dan perangkat kelurahan. Rumah tangga rent-

an, sekolah, serta fasilitas kesehatan menjadi kelompok yang diprioritaskan apabila terjadi defisit air bersih di sejumlah wilayah.

Pada saat yang sama, sosialisasi keliling menggunakan pengeras suara digencarkan untuk mendorong penghematan air sekaligus mencegah kebakaran. Warga diminta tidak membakar sampah maupun lahan karena kondisi vegetasi yang kering membuat api lebih mudah menjalar dan memperbesar potensi kerugian.

BPBD juga memperkuat koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, PLN, Dinas Pemadam Kebakaran, Satpol PP, Polres, Kodim, serta pemerintah kecamatan. Salah satu langkahnya ialah pemangkasan dan penebangan pohon yang dinilai berisiko, termasuk di sekitar jaringan kabel listrik dan poros Jalan Waruruma.

Kesiapsiagaan juga diperluas ke wilayah perairan. BPBD berkoordinasi dengan Pos SAR Baubau dan syahbandar untuk mengantisipasi kemungkinan penguatan angin serta gelombang yang dapat mengganggu aktivitas nelayan pada masa peralihan.

“El Nino bukan bencana yang datang mendadak seperti gempa. Ia datang perlahan, dan justru di situ bahayanya. Orang cenderung menganggapnya sekadar panas biasa sampai sumur mengering dan api sudah menjalar,” ujar Tasdik.

Dalam kerangka operasional SIGAP, BPBD menempatkan pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai lapis pertama penanganan. Relawan, kelurahan tangguh bencana, dan aparat kewilayahan diperkuat untuk menjaga mata dan telinga di tingkat komunitas, sementara data lapangan disinkronkan dengan BMKG, BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara,

dan BNPB.

Kekhawatiran terhadap dampak El Nino bukan tanpa preseden. BMKG mencatat Indonesia memiliki sejarah kekeringan dan kelangkaan air yang berkaitan dengan El Nino, antara lain pada 1997, 2015, dan 2019. Kekeringan pada periode tersebut tidak hanya memengaruhi pertanian, tetapi juga sumber daya air, kesehatan, kehutanan, dan kualitas lingkungan.

Pengalaman 2019 menunjukkan bagaimana kombinasi El Nino dan IOD positif dapat memperpanjang tekanan kekeringan. BMKG mencatat El Nino aktif sejak September 2018 hingga Juli 2019, sementara IOD positif menguat sejak April hingga Desember 2019. Pada tahun itu, sejumlah wilayah Indonesia mengalami periode tanpa hujan lebih dari 90 hari, bahkan Rumbangaru, Sumba Timur, mencatat 259 hari tanpa hujan.

Pada skala internasional, El Nino 2015-2016 menjadi salah satu kejadian terkuat yang pernah tercatat. Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) menyebut suhu permukaan laut di Pasifik tropis bagian tengah dan timur pada akhir 2015 melampaui 2 derajat Celsius di atas rata-rata, dengan kekuatan yang sebanding dengan peristiwa 1997-1998 dan 1982-1983.

WMO juga mencatat El Nino 2015-2016 berkontribusi terhadap kenaikan suhu global. Tahun 2016 kemudian tercatat sebagai tahun terpanas dalam catatan pengamatan pada saat itu, menunjukkan bahwa fenomena alami tersebut dapat memperkuat pemanasan global ketika berlangsung bersamaan dengan tren peningkatan suhu akibat perubahan iklim.

BMKG memperkirakan El Nino yang mulai aktif pada Juni 2026 dapat bertahan sekitar sembilan hingga 12 bulan, atau sampai kisaran Mei 2027. Karena itu, bagi Baubau, kesiapsiagaan tidak cukup hanya dilakukan ketika kekeringan mencapai puncak, tetapi perlu dipertahankan selama indikator cuaca menunjukkan potensi dampak. Kajian cepat juga disiapkan sebagai dasar rekomendasi kepada wali kota apabila dampak bencana melampaui kemampuan penanganan rutin. (*)

Debit Air Baku Menurun, Wali Kota Baubau HYF Siapkan Satgas Hadapi Ancaman El Nino



BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan yang dipicu fenomena El Nino. Penurunan debit air baku tidak hanya berpotensi mengurangi pelayanan Perumda Air Minum (PDAM), tetapi juga mulai mengancam lahan pertanian di sejumlah wilayah.

Antisipasi itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Antisipasi Dampak El Nino dan Penurunan Tingkat Layanan Air Bersih Perumda Air Minum Kota Baubau yang dipimpin Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, SE, di Aula Lantai II Kantor Wali Kota Baubau, Rabu (26/8/2026).

Pemerintah daerah dalam rapat tersebut memetakan kemungkinan dampak kekeringan sekaligus menyiapkan skenario penanganan apabila ketersediaan air semakin terbatas. Pembahasan mencakup aspek teknis, penganggaran, penguatan sumber air baku, hingga mekanisme distribusi air kepada masyarakat.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menangani kemungkinan munculnya persoalan air bersih. Satgas tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen koordinasi pemerintah apabila kekeringan mulai mengganggu kebutuhan dasar masyarakat di kawasan perkotaan.

Yusran mengatakan, indikasi berkurangnya ketersediaan air sudah mulai terlihat. Kondisi permukaan air di kawasan Karing-Karing menjadi salah satu contoh yang mendapat perhatian pemerintah. Untuk merespons kondisi tersebut, Pemkot Baubau telah memberikan bantuan pompa air.

“Kita sudah mulai melihat ada dampaknya, seperti permukaan air yang terdampak di Karing-Karing. Saat ini kita sudah antisipasi dengan memberikan bantuan pompa air,” kata Yusran.

Persoalan yang dihadapi PDAM, menurut Yusran, juga telah bergeser dari sekadar persoalan jaringan distribusi menjadi persoalan ketersediaan air baku. Infrastruktur jaringan yang sudah tersedia belum cukup menjamin pelayanan apabila debit sumber air mengalami penurunan.

“PDAM membutuhkan jaringan air. Tetapi sekarang, meskipun jaringan air ada, kondisi air kita hari ini tidak memungkinkan. Sehingga pelayanan air kita kepada masyarakat berkurang,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah daerah berencana memperkuat kembali ketersediaan sumber air sebagai fondasi peningkatan pelayanan PDAM. Upaya tersebut dinilai lebih mendasar dibandingkan hanya memperluas atau memperbaiki jaringan distribusi ketika pasokan air baku justru mengalami tekanan.

Untuk menghadapi kemungkinan kekeringan di kawasan perkotaan, Pemkot Baubau juga menyiapkan optimalisasi mobil tangki air milik pemerintah dan instansi terkait. Armada tersebut akan menjadi salah satu instrumen distribusi apabila pelayanan air melalui jaringan perpipaan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Apabila terjadi di dalam kota, paling tidak mobil-mobil tangki yang ada bisa mengatasi hal itu. Jangan sampai sudah terjadi kekeringan betul baru kita kaget dan bertanya apa yang harus kita lakukan,” tegas Yusran.

Dampak kekeringan tidak hanya menya-sar kebutuhan air rumah tangga. Data Dinas Pertanian Kota Baubau menunjukkan sejumlah wilayah persawahan di Karing-Karing dan Sorawolio mulai terdampak kondisi kering. Pemerintah daerah menyiapkan pompa air sebagai salah satu upaya mempertahankan pasokan air untuk lahan pertanian.

Yusran memastikan dirinya akan meninjau langsung persawahan yang terdampak. Langkah itu diperlukan agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi teknis di lapangan, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administratif penyaluran bantuan.

“Saya akan turun langsung meninjau lokasi persawahan yang terdampak kekeringan untuk memastikan langkah apa yang akan kita lakukan untuk para petani kita. Saya tidak mau memberikan bantuan tetapi bantuan tersebut tidak berfungsi apa-apa,” katanya.

Kekhawatiran terhadap dampak El Nino bukan tanpa dasar. BMKG mencatat Indonesia memiliki sejarah kekeringan dan kelangkaan air yang berkaitan dengan El Nino, antara lain pada 1997, 2015, dan 2019. Fenomena tersebut dapat memengaruhi pertanian, kesehatan, kualitas udara, serta ketersediaan air.

Pengalaman pada 2023 juga memperlihatkan besarnya tekanan El Nino terhadap sektor pertanian. BMKG mencatat pada Agustus 2023 sebanyak 23.451 hektare sawah terdampak kekeringan dan 6.964 hektare mengalami gagal panen. Pada periode yang sama, sebagian wilayah Indonesia juga mengalami keterlambatan musim hujan.

Secara global, El Nino merupakan bagian dari siklus El Nino-Southern Oscillation (ENSO), yakni interaksi atmosfer dan laut di Samudra Pasifik yang dapat mengubah pola cuaca di berbagai kawasan dunia. Bagi Indonesia, fase El Nino cenderung berkaitan dengan berkurangnya curah hujan sehingga risiko kekeringan meningkat. BMKG menjelaskan fenomena tersebut sebagai salah satu pengendali iklim penting Indonesia.

Pengalaman 2023 juga menunjukkan bahwa dampak El Nino dapat merembet dari persoalan air menuju ketahanan pangan. BMKG mencatat kombinasi El Nino dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif saat itu berdampak pada pertanian, sumber daya air, kehutanan, perdagangan, energi, dan kesehatan.

Bagi Baubau, pemerintah kini memilih memperkuat kesiapan sebelum kondisi kekeringan berkembang menjadi krisis pelayanan. Selain menyiapkan pompa dan armada tangki, koordinasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan sumber air, distribusi, pertanian, serta kebutuhan masyarakat dapat ditangani dalam satu skema.

Yusran juga meminta masyarakat ikut mengurangi tekanan terhadap sumber air dengan menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian. Pemerintah daerah menilai penghematan menjadi bagian penting dari mitigasi ketika debit sumber air belum kembali pada kondisi normal.

Apabila penyaluran air melalui mobil tangki nantinya diperlukan, Wali Kota meminta mekanismenya diatur secara terkoordinasi dan proporsional. Distribusi tidak boleh berhenti pada wilayah tertentu, tetapi harus menjangkau seluruh kelompok masyarakat yang membutuhkan.

“Kalau nanti ada bantuan air, kita harus mengatur dengan baik agar bisa merata ke semua lapisan masyarakat kita,” pungkas Yusran.

Dengan langkah tersebut, Pemkot Baubau berupaya memastikan ancaman El Nino tidak berkembang menjadi gangguan serius terhadap kebutuhan dasar warga. Pemerintah juga dituntut terus memantau kondisi sumber air dan lahan pertanian agar keputusan penanganan dapat dilakukan berdasarkan perkembangan nyata di lapangan. (PRASETIO M)